

pengawasan dapat berjalan dengan meminimalisir adanya potensi *conflict of interest* tetapi sistem pengawasan tersebut juga harus berlaku adil bagi Hakim Konstitusi sebagai objek pengawasannya agar independensi serta imparialitas dari Hakim Konstitusi tetap dapat terjaga.

- 2) Reformulasi terhadap sistem pengawasan internal Hakim Konstitusi ataupun pengembalian sistem pengawasan eksternal terhadap Hakim Konstitusi dapat dicoba kembali dengan sistem yang lebih baik, hal ini dilakukan sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas pengawasan terhadap Hakim Konstitusi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

A. Mukhtie Fadjar. "Hukum Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi." *Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan MK RI*, n.d., halaman 119.

Achmad Irwan Hamzani. "Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya." *Yustisia* 90 (2014): halaman 136.

Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Bagir Manan. *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Bandung: LPPM UNISBA, 1995.

Bambang Sutiyoso, S.H. M.Hum. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.

Bambang Waluyo, SH. *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin. *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara*

- Pidana*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Dr. Achmad Edi Subiyanto, SH. M.H. *Hakim Konstitusi: Kekuasaan Kehakiman Dan Pengisian Jabatan*. Depok: PT RAJAGRFINDO PERSADA, 2019.
- Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si. "Mahkamah Konstitusi Dan Pengujian Undang-Undang." *Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan MK RI*, n.d., halaman 5.
- Dr Wiryanto. *Etik Hakim Konstitusi: Rekonstruksi Dan Evolusi Sistem Pengawasan*. Jakarta: Rajagrafindo persada, 2019.
- Gultom, Binsar M. *Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2012.
- Imam Anshori Saleh. *Konsep Pengawasan Kehakiman: Upaya Memperkuat Kewenangan Konstitusional Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Peradilan*. Malang: Setara Press, 2014.
- J. Djohansyah. *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Kesaint Blanc, 2008.
- Jimly Ashiddiqie. *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1994.
- M. Tahir Azhary. *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*. Bogor: Kencana, 2003.
- M. Yahya Harahap. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Moh. Mahfud MD. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: LP3ES, 2007.
- Munir Fuady. *Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Palguna, I Dewa Gede. "Constitutional Question: Latar Belakang Dan Praktik Di Negara Lain Serta Kemungkinan Penerapannya Di Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol 17 (2010): halaman 3.
- . *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Paulus Effendi Lotulung. *Presfektif Fungsi MA Ke Depan, Dalam Henry P. Panggabean, Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktek Sehari-Hari; Upaya Menanggulangi Tunggakan Perkara Dan Pemberdayaan Fungsi Pengawasan MA*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001.
- Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H, M.A. *Penelitian Hukum Normatif*. Yogyakarta:

rajawali press, 2009.

Rimdan. *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Kencana, 2012.

S.F Marbun. "Negara Hukum Dan Kekuasaan Kehakiman." *Hukum Dan Ius Quria Lustum* 4 (1997): halaman 9.

Saleh, K. Wantjik. *Kehakiman Dan Peradilan*. Jakarta: Simbur Cahaya, 1976.

Sarif, H. A., & Firdaus, S. U. "Pengaturan Fungsi Pengawasan Internal Terhadap Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014)." *Res Publica*, 2018, halaman 63.

Soemitro, Rony Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo, 1995.

Sutan Torik, Mirza Nasution dan Nazaruddin. "Eksistensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Studi Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/X/2013)." *Konstitusi* 15 (2018).

Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, Dan Praktik*. Depok: Rajawali Press, 2018.

Syamsudin, M. *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*. Jakarta: KENCANA, 2021.

## **Jurnal**

Abdul Mukhtie Fajar. *Hukum Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, 2006.

Achmad Miftah Farid, Hibnu Nugroho, Dwi Hapsari Retnaningrum. "PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PERILAKU HAKIM OLEH MAHKAMAH AGUNG." *Soumatera Law Review* 1 (2018).

Achmad Roestandi. *Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, 2006.

Aidul Fitriadi Azhari, SH., M.Hum. "KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MERDEKA DAN BERTANGGUNG JAWAB DI MAHKAMAH KONSTITUSI: Upaya Menemukan Keseimbangan." *Jurisprudence* 2 (2005).

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi press, 2005.

Busthami, Dachran. "Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 46, no. 4 (2018): 336. doi:10.14710/mmh.46.4.2017.336-342.

Haposan Siallagan. "PENERAPAN PRINSIP NEGARA HUKUM DI INDONESIA." *Sosiohumaniora*, Volume 18 (2016): halaman 132.

Nanang sri Darmadi, SH. MH. "Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Hukum* Vol 25 (2011): halaman 676.

Rosita, Dian. "Mengkaji Ulang Konsep Rule of Law Dalam Pembaharuan Peradilan Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 1 (2008): halaman 6-20.

Shetreet Simon. "Judicial Independence the Contemporary Debate, Dordrecht: Marthinus Nijhof," 1985, halaman 150.

Simamora, Janpatar. "Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 3 (2014): 547-61. doi:10.20884/1.jdh.2014.14.3.318.

### **Internet**

Mahkamah Konstitusi. "Perintisan Dan Pembentukan Mahkamah Konstitusi," 2015. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11769>.

Harjono. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, 2008.

———. *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, 2006.

### **Hasil Penelitian**

"Berdasarkan Hasil Wawancara Bersama Dengan Bapak Dr. Irfan Nur Rahmn, S.H.,M.H. Selaku Peneliti Pada Mahkamah Konstitusi." n.d.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 tentang tentang pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 dan pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 terhadap UUD NRI 1945;

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang;

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2003 tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi Indonesia.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.